

Abstrak

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD. Dalam proses pelaksanaannya pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung pada Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2021, kesesuaian pelaksanaannya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan lain yang terkait, dan mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan lain yang terkait. Tahapan yang dilaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta keputusan yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi telah dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa, pengadaan langsung, permasalahan pengadaan

Abstract

Procurement of goods/services is an activity that has an important role in government whose funding comes from the APBN/APBD. In the process of implementation, the procurement of government goods/services must be in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 which regulates the Procurement of Government Goods/Services and other related regulations. This study aims to find out how the process of procurement of government goods/services with the direct procurement method at the Batanghari Regency Government in 2021, the conformity of its implementation with Presidential Regulation Number 16 of 2018 and other related regulations, and to know the obstacles and challenges faced in its implementation and the actions taken to overcome these problems. The data collection methods used in this study are literature studies, observations, and interviews. This research showed that the implementation of the procurement of goods/services using the direct procurement method at the Batanghari Regency Government in 2021 was in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 and other related regulations. The stages carried out and the parties involved in the procurement of goods/services are in accordance with applicable regulations, and the decisions taken in overcoming the problems faced have been able to overcome these problems.

Keywords: procurement of goods/services, direct procurement, procurement problems